

Digital culture and the construction of Islamic political discourse: Islamist women's subjectivation on Facebook

Sulbi Sulbi*, Inayah Rohmaniyah, Alim Roswantoro

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jl. Laksda Adisucipto, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia

Article History

Submitted date:
2025-07-15
Accepted date:
2026-02-20
Published date:
2026-05-23

Keywords:

collective efficacy;
collective identity;
political
subjectivation; digital
discourse; Islamic
politics; power-
knowledge

Abstract

This article examines how digital discursive practices on Facebook produce a regime of truth in Islamic politics and shape the political subjectivation of Islamist women within the Muslimah News Com community. Using a qualitative critical discourse approach integrated with the Social Psychology of Protest, the study analyzes posts and comment interactions that frame social and economic crises as structural failures of democratic capitalism while promoting Islamic governance as an alternative normative system. The findings show that Facebook functions as a cultural arena where meaning is collectively produced, reproduced, and stabilized through repetitive framing, symbolic opposition, emotional mobilization and social validation. Grievances related to social inequality and corruption are transformed into ideological consciousness, collective identity, and moral emotions, which, in turn, generate collective efficacy. The normalization of Islamic political discourse occurs through continuous opposition between democracy and Sharia-based governance, reinforced by participatory engagement and digital resonance. The study concludes that Islamic political truth in digital spaces is constructed through the interplay of discourse, identity formation, emotional mobilization, and perceived collective agency. Theoretically, this research contributes to the literature by integrating Foucauldian discourse analysis with the social-psychological dimensions of mobilization, highlighting how digital platforms operate as infrastructures of power-knowledge in shaping contemporary religious-political subjectivities.

Abstrak

Kata Kunci:

efikasi kolektif;
identitas kolektif;
Islam politik; kuasa-
pengetahuan;
subjektivasi politik;
wacana digital

Budaya digital dan konstruksi rezim kebenaran Islam Politik: Subjektivasi perempuan Islamis di Facebook

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik diskursif dalam budaya digital Facebook memproduksi rezim kebenaran Islam politik serta membentuk subjektivasi politik perempuan Islamis dalam komunitas Muslimah News Com. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis wacana kritis yang diintegrasikan dengan perspektif Social Psychology of Protest untuk mengkaji postingan dan interaksi komentar yang membingkai krisis sosial-ekonomi sebagai kegagalan struktural demokrasi kapitalis sekaligus mempromosikan sistem pemerintahan Islam sebagai alternatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Facebook berfungsi sebagai arena kultural tempat makna diproduksi, direproduksi, dan dinormalisasi melalui repetisi narasi, oposisi simbolik, mobilisasi emosi, dan validasi sosial. Grievance terkait ketimpangan dan korupsi ditransformasikan menjadi kesadaran ideologis, identitas kolektif, dan efikasi kolektif yang memperkuat keyakinan akan kemungkinan perubahan sistemik. Normalisasi wacana Islam politik berlangsung melalui oposisi berulang antara demokrasi dan syariat, yang distabilkan melalui partisipasi digital dan resonansi kolektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rezim kebenaran Islam politik di ruang digital terbentuk melalui interaksi antara diskursus, identitas, emosi, dan persepsi keberdayaan kolektif. Secara teoretis, studi ini berkontribusi dengan mengintegrasikan analisis diskursus Foucauldian dan dimensi psikologi sosial mobilisasi dalam menjelaskan pembentukan subjektivitas politik berbasis agama di era digital.

* Corresponding author:
sulbi.25694@gmail.com

1 Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah secara fundamental cara gagasan politik-keagamaan diproduksi, disirkulasikan, dan dilegitimasi di Indonesia (Meikle, 2016). Islam politik tidak lagi beroperasi semata melalui partai politik, organisasi massa, atau forum dakwah konvensional, melainkan berkembang dalam budaya digital sebagai ruang kultural yang memungkinkan distribusi narasi secara cepat, terdesentralisasi, dan partisipatif. Media sosial, khususnya Facebook, menjadi arena strategis bagi berbagai aktor untuk mendefinisikan realitas sosial, mbingkai krisis, dan membangun klaim kebenaran yang saling bersaing dalam ruang publik digital (Minty, 2019). Dalam konteks ini, ruang digital tidak sekadar berfungsi sebagai medium komunikasi, tetapi sebagai arena produksi makna yang menormalisasi apa yang dianggap benar, sah, dan Islami dalam komunitas tertentu (Atwan, 2015).

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa kontestasi politik-keagamaan kontemporer berlangsung melalui produksi dan stabilisasi rezim kebenaran yang bekerja secara diskursif (Khan, 2018). Narasi mengenai krisis ekonomi, ketidakadilan sosial, kegagalan demokrasi, dan tawaran sistem Islam sebagai solusi alternatif direproduksi secara berulang hingga tampil sebagai kebenaran yang seolah-olah alamiah. Proses ini tidak hanya membentuk horizon pemahaman kolektif, tetapi juga memproduksi posisi subjek tertentu yang memahami dirinya sebagai bagian dari komunitas ideologis dengan misi perubahan (Badran, 2001). Dengan demikian, budaya digital merupakan ruang tempat kuasa-pengetahuan beroperasi, membentuk subjektivitas, sekaligus memediasi mobilisasi simbolik dalam masyarakat jaringan (Gheytschi & Moghadam, 2014).

Sejumlah penelitian dalam satu dekade terakhir menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap relasi antara Islam politik dan media digital. Kajian mengenai jihadisme digital dan propaganda daring menekankan bagaimana media sosial digunakan untuk membangun legitimasi ideologis dan memperluas jaringan (Atwan, 2015). Studi tentang wacana Islam politik dalam ruang daring juga menyoroti proses framing, polarisasi, dan produksi identitas kolektif (Minty, 2019). Dalam konteks gender, penelitian tentang perempuan dalam gerakan Islam menunjukkan pergeseran posisi perempuan dari sekadar objek mobilisasi menjadi aktor yang memiliki agensi dalam produksi wacana (Badran, 2001; Esposito & KhosraviNik, 2023). Selain itu, kajian komunikasi digital menekankan pentingnya analisis diskursus untuk memahami bagaimana narasi diproduksi dan dinegosiasikan dalam interaksi daring (Esposito & KhosraviNik, 2023; Gu, 2023).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih menitikberatkan pada elite laki-laki, organisasi formal, atau mobilisasi jalanan sebagai locus utama analisis. Studi aktivisme digital cenderung berfokus pada penyebaran informasi, polarisasi, atau algoritma media sosial, tanpa mengurai secara mendalam bagaimana produksi diskursus membentuk subjektivasi politik dalam kerangka relasi kuasa-pengetahuan. Dengan kata lain, dimensi produksi rezim kebenaran dan pembentukan subjek perempuan dalam budaya digital Islam politik belum memperoleh perhatian analitik yang memadai (Skoric & Pang, 2024). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pembacaan yang lebih konseptual dan integratif mengenai hubungan antara diskursus, subjektivasi, dan orientasi mobilisasi dalam komunitas digital.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan pada dua aspek. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan perspektif diskursus Michel Foucault tentang rezim kebenaran dengan kerangka psikologi sosial mobilisasi dari Jacquelin van Stekelenburg dan Bert Klandermans untuk menjelaskan hubungan antara produksi makna dan pembentukan orientasi tindakan kolektif. Integrasi ini memungkinkan analisis yang tidak berhenti pada representasi naratif, tetapi menelusuri bagaimana klaim kebenaran diinternalisasi menjadi grievance, identitas kolektif, emosi moral, dan efikasi kolektif. Kedua, penelitian ini memfokuskan perhatian pada perempuan Islam sebagai

produsen aktif diskursus dalam komunitas Facebook Muslimah News Com, sehingga menghadirkan pembacaan yang menempatkan perempuan sebagai subjek politik dalam dinamika Islam politik digital.

Komunitas Muslimah News Com merupakan komunitas media dakwah digital berbasis Facebook yang aktif memproduksi dan menyebarkan konten bertema keislaman, sosial, ekonomi, dan politik melalui unggahan naratif, visual, serta interaksi komentar antarpengguna. Akun ini dikelola secara kolektif oleh jaringan aktivis perempuan Muslim yang memanfaatkan media sosial sebagai ruang dakwah sekaligus arena artikulasi kritik sosial-politik. Meskipun identitas pengelola tidak dicantumkan secara personal dan formal di halaman komunitas, pola produksi kontennya menunjukkan adanya struktur komunikasi yang terorganisasi dan konsisten dalam membangun narasi ideologis tertentu. Dalam konteks media digital, komunitas semacam ini dapat dipahami sebagai bentuk jaringan komunikasi alternatif yang memanfaatkan media sosial untuk membangun solidaritas simbolik dan identitas kolektif berbasis agama (Campbell & Evolvi, 2020; Fuchs, 2014).

Secara ideologis, konten yang diproduksi Muslimah News Com memperlihatkan kecenderungan pada orientasi Islam politik konservatif yang menempatkan syariat Islam sebagai solusi normatif terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik kontemporer. Narasi yang muncul secara berulang memperlihatkan kritik terhadap kapitalisme, demokrasi, oligarki, serta sistem ekonomi modern yang dianggap menghasilkan ketimpangan sosial dan krisis moral. Pada saat yang sama, komunitas ini mempromosikan gagasan pemerintahan Islam, ekonomi syariah, dan kepemimpinan berbasis nilai-nilai Islam sebagai alternatif sistemik. Pola semacam ini sejalan dengan karakteristik gerakan Islam politik digital yang memanfaatkan ruang daring untuk mendistribusikan narasi ideologis, membangun legitimasi moral, serta memperluas jangkauan mobilisasi simbolik dalam masyarakat jaringan (Atwan, 2015; Eltantawy, 2012; Hefner, 2020).

Pada periode pengumpulan data Januari–Juni 2025, akun Facebook Muslimah News Com memiliki ribuan pengikut aktif dengan intensitas interaksi yang cukup tinggi melalui komentar, tanda suka, dan penyebaran ulang unggahan. Tingginya partisipasi pengguna memperlihatkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai medium distribusi informasi, tetapi juga sebagai arena produksi makna dan penguatan resonansi ideologis melalui partisipasi kolektif (Boler & Davis, 2020). Dalam konteks sosial-politik digital Indonesia, komunitas ini dapat diposisikan sebagai bagian dari ekosistem wacana Islam politik digital yang berkembang melalui praktik komunikasi partisipatif dan reproduksi simbolik secara terus-menerus di ruang media sosial (Esposito & KhosraviNik, 2023; Skoric & Pang, 2024).

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana praktik diskursif dalam budaya digital komunitas Muslimah News Com di Facebook membentuk dan menormalisasi wacana Islam politik, serta bagaimana produksi diskursus tersebut membentuk subjektivasi dan orientasi mobilisasi simbolik perempuan Muslim dalam ruang digital. Melalui pendekatan ini, artikel ini berupaya memberikan kontribusi konseptual bagi kajian budaya, bahasa, dan sastra dalam memahami relasi antara diskursus, kuasa, media digital, dan pembentukan subjek politik-keagamaan di era kontemporer.

2 Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kritis dengan desain analisis wacana Foucauldian untuk mengkaji bagaimana praktik diskursif di Facebook membentuk dan menormalisasi wacana Islam politik serta membentuk subjektivasi politik perempuan Muslim dalam relasi kuasa-pengetahuan (Jensen, 2013; Pihlaja, 2021; Wilson et al., 2023). Secara analitik, pendekatan ini dipadukan dengan kerangka *Social Psychology of Protest* dari Jacquelin van Stekelenburg dan Bert Klandermans guna menelusuri transformasi diskursus menjadi grievance kolektif, identitas kolektif,

emosi politik, dan efikasi kolektif. Desain penelitian bersifat studi kasus terfokus pada komunitas Muslimah News Com di Facebook sebagai arena produksi dan sirkulasi wacana Islam politik digital.

Data dikumpulkan pada Januari–Juni 2025 melalui observasi digital non-partisipan, dokumentasi tangkapan layar, serta pengarsipan konten teks dan visual yang dipublikasikan secara terbuka di Facebook. Unit analisis mencakup postingan utama, caption, komentar pengguna, dan pola interaksi digital dalam komunitas tersebut. Sebanyak 126 postingan berhasil dihimpun, kemudian dipilih 20 postingan sebagai korpus utama berdasarkan tingkat interaksi, intensitas reproduksi komentar, dan kepadatan narasi ideologis. Selain itu, dipilih 30 komentar pengguna yang memuat dukungan terhadap narasi Islam politik, kritik terhadap demokrasi atau kapitalisme, serta afirmasi terhadap sistem pemerintahan Islam. Pemilihan data dilakukan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria narasi krisis sosial-ekonomi, delegitimasi sistem demokrasi, promosi sistem Islam, dan keterlibatan interaksi digital yang relatif tinggi (Gee & Handford, 2023; Skoric & Pang, 2024).

Untuk memperkuat validitas data, penelitian ini menerapkan proses verifikasi autentisitas akun secara bertahap. Akun yang dianalisis dipilih berdasarkan aktivitas yang konsisten, keberadaan riwayat unggahan personal, interaksi sosial yang berulang, serta keterhubungan akun dengan jaringan pengguna lain di Facebook. Akun anonim, akun dengan identitas tidak jelas, akun yang tidak memiliki aktivitas personal, serta akun dengan pola interaksi artifisial seperti komentar berulang otomatis dan aktivitas unggahan yang tidak wajar tidak dimasukkan dalam korpus penelitian. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan keterlibatan akun bot atau akun palsu dalam proses analisis (Cirucci & Pruchniewska, 2022; Skoric & Pang, 2024).

Karena penelitian berfokus pada perempuan Muslim, identifikasi gender dilakukan secara terbatas melalui indikator identitas digital yang tampil secara publik, seperti nama akun, foto profil, penggunaan sapaan gender, pola bahasa, serta konsistensi representasi diri dalam interaksi daring. Penelitian ini tidak mengklaim verifikasi biologis atau identitas personal pengguna secara absolut, melainkan menggunakan pendekatan identifikasi performatif berbasis representasi diri digital (*self-presentation*) sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian media sosial dan etnografi digital (Campbell & Evolvi, 2020; Wilson et al., 2023). Oleh karena itu, analisis lebih difokuskan pada performativitas identitas perempuan dalam praktik diskursif digital dibandingkan pada autentikasi identitas personal pengguna secara langsung.

Dalam aspek etika penelitian digital, penelitian ini hanya menggunakan data yang tersedia secara publik dan tidak mengakses ruang privat, pesan personal, maupun grup tertutup. Nama akun pengguna disamarkan dalam proses penulisan dan interpretasi data guna melindungi privasi partisipan digital. Tangkapan layar dan kutipan komentar digunakan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip minimisasi risiko, anonimitas, dan keamanan identitas digital pengguna. Penelitian ini juga menempatkan pengguna media sosial bukan sebagai objek personal, melainkan sebagai bagian dari praktik diskursif yang dianalisis dalam konteks budaya digital dan komunikasi publik.

Analisis dilakukan secara iteratif melalui tahap pengorganisasian data, *open coding* untuk mengidentifikasi unit makna seperti framing krisis, kritik sistemik, dan klaim normatif (Gee & Handford, 2023), dilanjutkan dengan *axial coding* untuk membentuk kategori tematik dan pola relasi antarwacana (Adu & Anthony Miles, 2023). Analisis formasi diskursif digunakan untuk menelaah pola repetisi, normalisasi makna, oposisi simbolik, dan struktur legitimasi wacana dalam komunitas digital. Selanjutnya, analisis subjektivasi diarahkan untuk menelusuri pembentukan grievance kolektif, identitas religius kolektif, emosi politik, dan efikasi kolektif digital (Stekelenburg & Klandermans, 2023). Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teori,

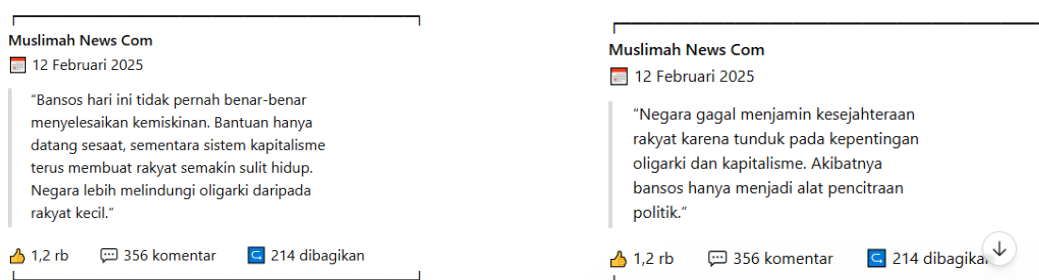
pemeriksaan konsistensi pola diskursif, serta dokumentasi *audit trail* yang sistematis sehingga proses interpretasi dapat dievaluasi secara kritis dan transparan (Skoric & Pang, 2024; Wilson et al., 2023).

3 Hasil

3.1 Kritik terhadap Distribusi Bantuan Sosial dan Konstruksi Kemiskinan Struktural

Analisis terhadap 20 postingan utama menunjukkan bahwa isu bantuan sosial tidak sekadar diposisikan sebagai kebijakan publik, melainkan direpresentasikan sebagai simbol kegagalan moral dan struktural negara dalam mengurus rakyat. Dalam salah satu unggahan, akun Komunitas Muslimah News menuliskan:

Gambar 1. Postingan Kritik terhadap Bantuan Sosial dan Kapitalisme
Sumber: Dokumentasi peneliti dari akun Facebook Muslimah News Com, Februari 2025



Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, kritik terhadap bantuan sosial tidak hanya diarahkan pada aspek teknis distribusi, tetapi diperluas menjadi kritik terhadap struktur ekonomi-politik negara. Frasa seperti “tunduk pada kepentingan oligarki dan kapitalisme” menunjukkan konstruksi relasi antagonistik antara negara dan rakyat, sedangkan ungkapan “alat pencitraan politik” membangun delegitimasi moral terhadap kebijakan bansos. Narasi tersebut memperlihatkan bagaimana komunitas Muslimah News merepresentasikan kemiskinan sebagai konsekuensi sistemik dari kapitalisme dan dominasi elite politik-ekonomi..

Pilihan diksi seperti “gagal”, “oligarki”, “kapitalisme”, dan “alat pencitraan politik” menunjukkan adanya konstruksi moral yang menempatkan negara sebagai aktor yang tidak amanah dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Bahasa krisis seperti “tidak tepat sasaran”, “disalahgunakan”, dan “mengendap tanpa manfaat” digunakan secara berulang untuk membangun persepsi mengenai lemahnya legitimasi negara dalam pengelolaan kesejahteraan sosial.

Dalam struktur narasi yang lebih luas, kemiskinan tidak dipahami sebagai persoalan administratif atau teknis birokrasi semata, melainkan sebagai konsekuensi dari sistem sosial-ekonomi yang dianggap salah secara fundamental. Kapitalisme direpresentasikan sebagai sistem yang menumbuhkan kesenjangan sosial dan melanggengkan dominasi elite ekonomi-politik.

Narasi tersebut memperlihatkan bahwa komunitas Muslimah News membangun hubungan kausal antara kemiskinan, ketimpangan distribusi kekayaan, dan sistem ekonomi-politik nasional. Negara tidak direpresentasikan sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai regulator yang dianggap memberi ruang dominan kepada kekuatan modal dan kepentingan elite. Dalam konstruksi ini, rakyat miskin diposisikan sebagai korban sistemik, sedangkan elite ekonomi-politik dipresentasikan sebagai pihak yang diuntungkan.

Frekuensi pada Tabel 1 diperoleh melalui proses *open coding* terhadap 20 postingan utama dengan menghitung kemunculan tema dominan yang muncul secara berulang dalam narasi unggahan. Satu unggahan dapat memuat lebih dari satu kategori framing sehingga jumlah total frekuensi tidak

dimaksudkan sebagai data statistik kuantitatif, melainkan sebagai indikator kecenderungan pola wacana dalam korpus penelitian.

Tabel 1. Pola Framing Budaya dalam Postingan tentang Bansos (n = 20)

Tema Framing	Frekuensi	Representasi Budaya Dominan
Ketidaktepatan sasaran	15	Negara tidak amanah
Penyalahgunaan dana	12	Praktik tidak bermoral
Kemiskinan struktural	17	Sistem zalim dan timpang
Delegitimasi negara	18	Negara gagal mengurus umat

Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, kritik terhadap negara dan konstruksi kemiskinan struktural menjadi pola yang paling dominan. Temuan ini memperlihatkan bahwa wacana bansos dibangun melalui oposisi simbolik antara “negara/oligarki” dan “rakyat”, serta melalui narasi ketidakadilan yang dipahami sebagai persoalan sistemik. Dengan demikian, kritik terhadap kebijakan bansos tidak berdiri sebagai kritik administratif semata, tetapi menjadi bagian dari konstruksi makna yang lebih luas mengenai krisis tata kelola, ketimpangan sosial, dan delegitimasi sistem ekonomi-politik yang berlaku.

3.2 Respons dan Afirmasi Ideologis di Kolom Komentar

Analisis terhadap 30 komentar terpilih menunjukkan bahwa ruang komentar berfungsi sebagai arena reproduksi, penguatan, dan normalisasi makna yang telah dibangun dalam postingan utama. Respons yang muncul umumnya tidak bersifat netral atau informatif, melainkan afirmatif, emosional, dan normatif. Mayoritas komentar mengulang konstruksi bahwa negara tidak berpihak kepada rakyat serta bahwa kemiskinan dipahami sebagai konsekuensi dari sistem kapitalisme dan oligarki politik (Karim, 2025; Farty, 2024; Silim, 2024). Dalam salah satu komentar, pengguna menuliskan:

Gambar 2. Respons Pengguna di Kolom Komentar

Sumber: Dokumentasi peneliti dari kolom komentar akun Muslimah News Com, 2025.



Gambar 2 menunjukkan bahwa ruang komentar tidak hanya menjadi tempat respons individual, tetapi juga arena reproduksi makna dan penguatan identitas kolektif. Komentar-komentar pengguna memperlihatkan pola afirmasi terhadap kritik kapitalisme sekaligus promosi sistem Islam sebagai alternatif normatif. Kutipan-kutipan tersebut menunjukkan bahwa kolom komentar tidak hanya berisi opini individual, tetapi juga mereproduksi kerangka makna yang telah dibangun dalam unggahan utama. Narasi mengenai “negara gagal”, “oligarki”, “kapitalisme”, dan “rakyat sengsara” muncul secara berulang sehingga membentuk pola bahasa kolektif yang relatif seragam.

Secara kultural, bahasa yang digunakan memperlihatkan pola solidaritas dan penyamaan posisi moral antara sesama pengguna. Ungkapan seperti “negara tidak peduli rakyat”, “elit oligarki dilindungi”, “umat terus dizalimi”, dan “sistem rusak” membentuk diksi kolektif yang menegaskan batas simbolik antara “kami” (rakyat/umat) dan “mereka” (negara/elite). Dalam konteks ini, ruang komentar berfungsi sebagai arena artikulasi identitas bersama sekaligus ruang afektif tempat pengguna saling mengafirmasi pengalaman sosial dan keyakinan ideologis.

Selain afirmasi kritik sosial-ekonomi, ditemukan pula transformasi wacana menjadi seruan normatif terhadap sistem pemerintahan Islam. Tagar dan slogan seperti “tegakkan pemerintahan Islam”, “Islam solusi negeri”, dan “back to Islam kaffah” muncul berulang sebagai bentuk ekspresi aspirasi sistem alternatif (Erbayanthi, 2024; Rini Yusuf, 2024; Lillahalkhalish, 2024; Juwita, 2024). Dalam salah satu komentar disebutkan:

Gambar 3. Respons Pengguna terhadap Kritik Kapitalisme dan Demokrasi
Sumber: Dokumentasi peneliti dari kolom komentar akun Facebook Muslimah News Com, 2025



Sebagaimana terlihat pada Gambar 3, pengguna tidak hanya mengafirmasi kritik terhadap kapitalisme dan demokrasi, tetapi juga secara eksplisit mempromosikan Islam sebagai solusi normatif terhadap persoalan sosial-politik. Komentar seperti “Islam kaffah adalah solusi untuk negeri ini” dan “demokrasi hanya melahirkan ketidakadilan” menunjukkan proses transformasi kritik sosial menjadi aspirasi ideologis yang lebih sistemik. Bahasa yang digunakan bersifat deklaratif, persuasif, dan normatif sehingga memperlihatkan bagaimana ruang komentar berfungsi sebagai arena penguatan identitas kolektif dan normalisasi wacana Islam politik dalam budaya digital.

Dengan demikian, kolom komentar berfungsi sebagai ruang reproduksi ideologis sekaligus arena penguatan solidaritas simbolik berbasis identitas keagamaan.

Tabel 2. Pola Respons Budaya dalam Kolom Komentar (n = 30)

Kategori Respons	Frekuensi	Ekspresi Budaya Dominan
Afirmasi kritik bansos	21	Negara tidak amanah
Kritik kapitalisme/demokrasi	24	Sistem rusak dan pro-oligarki
Seruan pemerintahan Islam	18	Islam sebagai solusi normatif

Frekuensi pada Tabel 2 diperoleh melalui proses *open coding* terhadap 30 komentar terpilih dengan mengidentifikasi tema-tema dominan yang muncul secara berulang dalam interaksi pengguna. Satu komentar dapat mengandung lebih dari satu kategori respons sehingga angka frekuensi menunjukkan intensitas kemunculan tema, bukan distribusi statistik kuantitatif yang bersifat eksklusif.

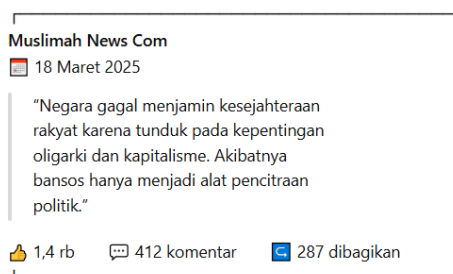
Sebagaimana terlihat pada Tabel 2, kritik terhadap kapitalisme dan demokrasi menjadi respons yang paling dominan, diikuti afirmasi terhadap pemerintahan Islam sebagai solusi alternatif. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa komentar yang bersifat lebih moderat, skeptis, atau tidak sepenuhnya sejalan dengan narasi dominan komunitas, meskipun jumlahnya relatif kecil dan tidak memperoleh resonansi interaksi sebesar komentar afirmatif lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa ruang media sosial tetap bersifat heterogen dan terbuka terhadap berbagai posisi wacana, meskipun dalam komunitas tertentu terdapat kecenderungan dominasi narasi ideologis yang lebih kuat.

Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa kolom komentar tidak hanya menjadi ruang respons spontan pengguna, tetapi juga berfungsi sebagai arena konsolidasi makna, penguatan identitas kolektif, dan normalisasi wacana ideologis yang diproduksi melalui interaksi digital secara berulang.

3.3 Kritik terhadap Kapitalisme dan Normalisasi Sistem Pemerintahan Islam

Analisis terhadap postingan bertema ekonomi nasional menunjukkan intensifikasi kritik terhadap kapitalisme sebagai sistem yang dianggap melahirkan kesenjangan sosial, dominasi oligarki, dan ketidakadilan ekonomi. Dalam beberapa unggahan, kapitalisme direpresentasikan bukan hanya sebagai sistem ekonomi yang gagal secara teknis, tetapi juga sebagai tatanan yang dipandang kehilangan dimensi moral dan keberpihakan terhadap rakyat. Salah satu postingan menuliskan:

Gambar 3. Kritik terhadap Kapitalisme dalam Postingan Muslimah News
Sumber: Dokumentasi peneliti dari akun Facebook Muslimah News Com, Maret 2025



Pada unggahan lain digunakan istilah “serakahnomics” untuk menggambarkan praktik ekonomi yang dianggap sarat keserakahan dan hanya menguntungkan elite ekonomi. Pilihan istilah tersebut membentuk simbolisasi budaya mengenai sistem ekonomi yang dipersepsikan tidak manusiawi, materialistik, dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Narasi yang berkembang menempatkan kenaikan harga kebutuhan pokok, ketimpangan distribusi kekayaan, serta dominasi pemodal sebagai konsekuensi logis dari sistem kapitalisme.

Bahasa yang digunakan bersifat oposisional dengan membenturkan “kapitalisme” terhadap “keadilan”, serta “elite/oligarki” terhadap “rakyat/umat”. Dengan demikian, kapitalisme direpresentasikan sebagai sumber krisis sosial-ekonomi sekaligus penyebab lemahnya perlindungan negara terhadap masyarakat kecil. Dalam konteks ini, kritik ekonomi tidak berhenti pada persoalan kebijakan publik, tetapi berkembang menjadi delegitimasi terhadap sistem ekonomi-politik yang berlaku.

Sebaliknya, sistem ekonomi Islam dipresentasikan sebagai tatanan alternatif yang dianggap adil, menyeluruh, dan menyejahterakan. Penekanan utama terletak pada distribusi kekayaan yang merata, pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan umat, serta tanggung jawab negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat.

Tabel 3. Struktur Representasi Sistem Ekonomi dalam Postingan

Elemen Representasi	Kapitalisme	Sistem Ekonomi Islam
Orientasi nilai	Materialistik	Berbasis syariah
Distribusi kekayaan	Timpang	Adil dan merata
Peran negara	Regulator pasar	Pengurus dan penjamin
Dampak sosial	Kesenjangan sosial	Kesejahteraan umat

Narasi lain menekankan pentingnya swasembada pangan, dukungan terhadap petani melalui penyediaan lahan dan infrastruktur, serta bantuan modal usaha tanpa riba sebagai bagian dari praktik ekonomi Islam. Dengan demikian, sistem Islam tidak hanya direpresentasikan secara normatif, tetapi juga dikonstruksi sebagai sistem yang operasional dan aplikatif dalam mengatasi problem sosial-ekonomi.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3, representasi kedua sistem dibangun melalui oposisi nilai yang tegas. Kapitalisme diposisikan sebagai sumber ketimpangan dan dominasi oligarki, sementara sistem ekonomi Islam direpresentasikan sebagai solusi moral dan struktural yang diyakini mampu menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif. Pola makna tersebut kemudian direproduksi dan diperkuat dalam kolom komentar pengguna. Analisis terhadap komentar menunjukkan konsistensi dukungan terhadap gagasan pemerintahan Islam sebagai solusi alternatif terhadap krisis sosial-ekonomi. Bahasa yang digunakan partisipan cenderung afirmatif, deklaratif, dan normatif. Kapitalisme direpresentasikan sebagai sistem yang “rusak”, “zalim”, dan “pro-oligarki”, sedangkan Islam diposisikan sebagai solusi yang “adil”, “jujur”, dan “kaffah” (Fikry, 2024; Cristianti, 2024; Uswatun, 2025).

Gambar 4. Respons Pengguna terhadap Kapitalisme dan Pemerintahan Islam
Sumber: Dokumentasi peneliti dari kolom komentar akun Facebook Muslimah News Com, 2025



Komentar-komentar tersebut tidak hanya mengulang isi postingan utama, tetapi juga memperluasnya melalui ekspresi emosional dan simbolik. Ungkapan seperti “back to Islam kaffah”, “tegakkan pemerintahan Islam”, dan “Islam solusi terbaik” menunjukkan transformasi kritik sosial menjadi aspirasi ideologis yang lebih sistemik. Bahasa religius seperti “astaghfirullah”, “syariah”, dan “khilafah” memperlihatkan penguatan dimensi moral-spiritual dalam argumentasi yang dibangun pengguna.

Tabel 4. Pola Dukungan Ideologis dalam Komentar (n = 30)

Pola Ekspresi	Frekuensi	Representasi Budaya Dominan
Kritik kapitalisme	25	Sistem rusak dan zalim
Afirmasi Islam sebagai solusi	22	Sistem adil dan kaffah
Seruan penegakan pemerintahan Islam	19	Ajakan kolektif normatif

Frekuensi pada Tabel 1 diperoleh melalui proses *open coding* terhadap komentar pengguna dengan mengidentifikasi tema-tema dominan yang muncul secara berulang. Satu komentar dapat memuat lebih dari satu bentuk ekspresi sehingga angka frekuensi menunjukkan intensitas kemunculan tema dalam korpus data.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan adanya konsolidasi makna antara postingan utama dan respons pengguna di kolom komentar. Delegitimasi kapitalisme dan normalisasi sistem pemerintahan Islam tampil sebagai narasi yang saling menguatkan dalam ruang digital komunitas Muslimah News. Dengan demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai medium distribusi informasi, tetapi juga sebagai arena produksi identitas kolektif, penguatan solidaritas simbolik, dan reproduksi wacana ideologis secara berulang dalam budaya digital.

4 Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya digital Facebook tidak hanya berfungsi sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai arena produksi, negosiasi, dan stabilisasi makna politik-keagamaan di kalangan perempuan Islamis pendukung Komunitas Muslimah News. Dalam konteks ini, praktik diskursif yang diproduksi melalui postingan, komentar, tagar, visual, serta distribusi ulang konten membentuk narasi kolektif mengenai krisis sosial, kegagalan negara, dan pentingnya sistem Islam sebagai alternatif moral-politik. Temuan ini sejalan dengan pandangan Boler dan Davis (2020) bahwa media digital bekerja melalui politik afektif yang memungkinkan emosi, simbol, dan ideologi beredar secara intens dan membentuk orientasi politik kolektif. Fuchs (2014) juga menegaskan bahwa media sosial merupakan ruang kapitalisme komunikatif yang memungkinkan reproduksi ideologi melalui logika visibilitas, resonansi, dan partisipasi pengguna. Dalam konteks ini, budaya digital tidak bersifat netral, melainkan arena relasi kuasa tempat identitas, keyakinan, dan orientasi politik diproduksi serta dinegosiasikan secara terus-menerus (Campbell & Evolvi, 2020; Esposito & KhosraviNik, 2023).

Narasi yang berkembang dalam komunitas ini memperlihatkan kecenderungan untuk mengonstruksi berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, korupsi, pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan krisis kesejahteraan sebagai konsekuensi sistemik dari demokrasi kapitalis. Pola ini menunjukkan adanya simplifikasi simbolik yang menghubungkan persoalan sosial dengan struktur ideologis tertentu. Barisione dan Michailidou (2017) menjelaskan bahwa budaya politik digital cenderung membangun oposisi simbolik yang menyederhanakan realitas kompleks menjadi dikotomi moral yang mudah dikenali komunitas daring. Dalam penelitian ini, oposisi tersebut muncul melalui konstruksi "Islam versus kapitalisme", "umat versus oligarki", atau "keadilan versus demokrasi sekuler". Melalui repetisi narasi dan distribusi algoritmik, oposisi tersebut mengalami stabilisasi makna dan perlahan tampil sebagai horizon normatif yang dianggap masuk akal oleh komunitas digital (Meikle, 2016).

Namun demikian, penelitian ini tidak memandang media sosial sebagai ruang yang homogen. Salah satu aspek penting yang muncul adalah adanya heterogenitas respons dan keberadaan resistensi diskursif. Meskipun komentar afirmatif tampak dominan, ruang digital tetap memperlihatkan keberagaman interpretasi dan negosiasi makna. Hal ini penting ditekankan agar penelitian tidak terjebak pada asumsi bahwa seluruh pengguna menerima begitu saja narasi ideologis yang diproduksi komunitas. Vlavo (2017) menegaskan bahwa aktivisme digital selalu berlangsung dalam medan yang cair, penuh kontestasi, dan terbuka terhadap reinterpretasi. Dey (2018) juga menunjukkan bahwa media sosial menyediakan ruang bagi produksi kontra-narasi dan resistensi terhadap dominasi makna tertentu. Dengan demikian, meskipun penelitian ini menemukan kecenderungan dominasi wacana Islam politik dalam komunitas tersebut, dominasi itu tidak bersifat absolut karena tetap berada dalam ruang digital yang dinamis dan kontestatif.

Dalam perspektif Foucauldian, temuan ini memperlihatkan bagaimana relasi kuasa-pengetahuan bekerja melalui mekanisme produksi dan normalisasi wacana. Foucault (1980, 1995, 2013) menjelaskan bahwa kekuasaan modern tidak semata bekerja melalui represi, tetapi melalui produksi pengetahuan yang membentuk cara individu memahami realitas. Narasi yang terus diulang mengenai kegagalan demokrasi dan superioritas sistem Islam membentuk apa yang disebut Foucault sebagai "rezim kebenaran", yakni mekanisme sosial yang menentukan wacana mana yang dianggap sah, rasional, dan legitimate dalam komunitas tertentu. Dalam konteks budaya digital, legitimasi tersebut tidak lahir dari institusi formal, melainkan dari sirkulasi konten, repetisi simbolik, dan validasi sosial melalui komentar, likes, serta distribusi ulang postingan (Mills, 2003; Taylor, 2010). Kologlugil (2010) menjelaskan bahwa pendekatan arkeologi pengetahuan Foucault memungkinkan peneliti melihat bagaimana sistem pemikiran tertentu diproduksi dan diterima sebagai kebenaran sosial dalam



konteks historis tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini tidak memosisikan “kebenaran Islam politik” sebagai kebenaran objektif, melainkan sebagai konstruksi diskursif yang memperoleh legitimasi dalam ruang budaya digital tertentu.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa media sosial memungkinkan berkembangnya bentuk baru religio-political engagement di kalangan perempuan Muslim. Campbell dan Evolvi (2020) menyebut fenomena ini sebagai bagian dari digital religion, yaitu proses ketika praktik keberagamaan mengalami transformasi melalui teknologi digital. Dalam komunitas ini, agama tidak hanya tampil sebagai identitas spiritual, tetapi juga sebagai perangkat interpretasi politik dan solusi sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa ruang digital telah menjadi medium penting dalam artikulasi Islam politik kontemporer (Atwan, 2015). Atwan (2015) bahkan menegaskan bahwa media digital memiliki kemampuan memperluas resonansi ideologis karena memungkinkan penyebaran simbol dan narasi secara cepat, masif, dan lintas batas geografis.

Dimensi gender menjadi aspek penting dalam penelitian ini. Perempuan dalam komunitas digital ini tidak lagi ditempatkan sebagai subjek pasif, tetapi sebagai aktor aktif dalam produksi dan distribusi wacana Islam politik. Temuan ini memperkuat argumentasi Badran (2001) dan Mustofa dan Taufiq (2024) bahwa perempuan Muslim kontemporer memiliki posisi yang semakin aktif dalam pembentukan diskursus keagamaan dan politik. Dalam konteks media sosial, perempuan tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen makna yang terlibat dalam framing isu, distribusi ideologi, dan pembentukan solidaritas simbolik. Behiery (2015) menunjukkan bahwa organisasi dan komunitas perempuan Muslim berbasis digital mampu membentuk jejaring identitas religius yang kuat melalui partisipasi daring. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam komunitas ini memperlihatkan transformasi bentuk partisipasi politik-keagamaan dari ruang fisik menuju ruang virtual.

Selain dimensi identitas, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya aspek afektif dalam mobilisasi digital. Politik digital bekerja bukan hanya melalui argumentasi rasional, tetapi juga melalui produksi emosi kolektif. Boler dan Davis (2020) menjelaskan bahwa media digital memungkinkan emosi seperti marah, kecewa, takut, dan harapan dimobilisasi menjadi energi politik. Dalam penelitian ini, emosi kolektif dibentuk melalui framing moral tentang ketidakadilan sosial, korupsi, dan dominasi elit politik-ekonomi. Simbol seperti “serakahnomics” memperlihatkan bagaimana bahasa digunakan untuk memadatkan kritik moral terhadap sistem kapitalisme. Emosi politik tersebut kemudian diperkuat melalui repetisi dan validasi sosial di ruang digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa mobilisasi perempuan Islamis dalam media sosial tidak hanya berbasis ideologi, tetapi juga resonansi emosional dan solidaritas afektif (Yoong, 2020).

Lebih jauh, penelitian ini memperlihatkan bahwa subjektivasi politik perempuan Islamis berlangsung melalui integrasi antara grievance kolektif, identitas religius, dan efikasi kolektif. Stekelenburg dan Klandermans (2023) menjelaskan bahwa mobilisasi sosial terjadi ketika individu merasa memiliki identitas bersama, mengalami ketidakadilan kolektif, dan percaya bahwa perubahan dapat diwujudkan melalui tindakan kolektif. Dalam konteks penelitian ini, media sosial menjadi ruang yang memungkinkan pengalaman individual diterjemahkan menjadi kesadaran ideologis bersama. Identitas kolektif dibangun melalui pengulangan narasi bahwa umat Islam berada dalam situasi ketidakadilan struktural akibat sistem demokrasi kapitalis. Dengan demikian, media sosial bukan hanya sarana komunikasi, tetapi mekanisme pembentukan subjek politik baru yang merasa memiliki misi moral dan religius bersama (Hefner, 2020).

Meskipun demikian, penelitian ini tetap memiliki keterbatasan epistemologis. Data digital tidak selalu merepresentasikan identitas personal secara autentik karena media sosial memungkinkan anonimitas, performativitas identitas, dan reproduksi simbolik yang cair (Cirucci & Pruchniewska,

2021). Oleh sebab itu, penelitian ini tidak mengklaim bahwa seluruh perempuan Muslim mendukung Islam politik atau memiliki orientasi ideologis yang seragam. Penelitian hanya menunjukkan adanya kecenderungan pola diskursif dominan dalam komunitas digital tertentu pada periode tertentu dan penelitian digital juga harus dipahami sebagai interpretasi terhadap representasi daring, bukan pembacaan absolut terhadap realitas sosial pengguna.

Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa budaya digital Facebook berfungsi sebagai arena pembentukan makna politik-keagamaan melalui relasi kuasa-pengetahuan yang berlangsung secara partisipatif, simbolik, dan afektif. Produksi wacana, pembentukan identitas kolektif, mobilisasi emosi, dan normalisasi sistem Islam berjalan secara simultan melalui interaksi digital yang berulang. Namun, proses tersebut tetap berlangsung dalam ruang yang heterogen dan kontestatif, sehingga narasi dominan yang muncul tidak dapat dipahami sebagai representasi tunggal pengalaman perempuan Muslim secara keseluruhan.

5 Simpulan

Artikel ini menegaskan bahwa produksi rezim kebenaran Islam politik dan subjektivasi perempuan Islamis dalam komunitas Muslimah News Com di Facebook berlangsung secara simultan dan saling menguatkan melalui praktik diskursif yang berulang. Framing krisis ekonomi, delegitimasi demokrasi, serta promosi sistem Islam sebagai solusi membentuk horizon makna kolektif yang dinormalisasi dalam interaksi digital. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai arena produksi makna, legitimasi ideologis, dan pembentukan identitas kolektif berbasis religio-politik. Kebenaran politik tampil sebagai hasil konstruksi kuasa-pengetahuan yang diproduksi, divalidasi, dan distabilkan melalui partisipasi simbolik pengguna dalam budaya digital.

Dengan mengintegrasikan perspektif Michel Foucault dan *Social Psychology of Protest* dari Jacquelin van Stekelenburg dan Bert Klandermans, penelitian ini menunjukkan bahwa produksi wacana, pembentukan identitas kolektif, mobilisasi emosi, dan efikasi kolektif bekerja secara terpadu dalam membentuk subjektivitas politik perempuan Islamis di ruang digital. Temuan ini memperlihatkan bahwa mobilisasi Islam politik digital tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga kultural, afektif, dan psikologis. Perempuan dalam komunitas digital tidak lagi berada pada posisi pasif sebagai penerima pesan, tetapi berperan aktif dalam reproduksi narasi, distribusi simbol, dan penguatan solidaritas ideologis melalui jejaring media sosial.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, penelitian hanya berfokus pada satu komunitas digital di Facebook sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi untuk merepresentasikan seluruh perempuan Muslim atau seluruh gerakan Islam politik digital di Indonesia. Kedua, data penelitian berasal dari representasi digital yang bersifat performatif, sehingga identitas personal, motivasi pengguna, dan autentisitas akun tidak dapat diverifikasi secara absolut. Ketiga, penelitian ini lebih menekankan analisis terhadap pola diskursif dominan sehingga belum mengeksplorasi secara mendalam bentuk resistensi, kontra-wacana, atau keberagaman interpretasi pengguna dalam ruang digital. Keempat, penelitian ini terbatas pada observasi aktivitas daring sehingga belum mampu menjelaskan keterkaitan langsung antara mobilisasi digital dan tindakan sosial-politik di luar media sosial.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan dilakukan secara komparatif dengan melibatkan berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Telegram, atau X untuk melihat perbedaan pola produksi dan sirkulasi wacana Islam politik digital. Studi longitudinal juga penting dilakukan untuk memahami perubahan narasi, dinamika identitas kolektif, dan transformasi strategi mobilisasi dari waktu ke waktu. Selain itu, penelitian mendatang perlu menggabungkan analisis digital dengan wawancara mendalam atau etnografi digital agar dapat

menjelaskan hubungan antara identitas daring, pengalaman sosial nyata, dan orientasi tindakan politik pengguna secara lebih komprehensif. Pendekatan tersebut akan memperkaya pemahaman mengenai transformasi politik keagamaan, budaya digital, dan pembentukan subjektivitas politik perempuan Muslim di era media sosial kontemporer

Disclosure Statement

The authors claim there is no conflict of interest.

Referensi

- Adu, P., & Anthony Miles, D. (2023). Dissertation Research Methods: A Step-by-Step Guide to Writing Up Your Research in the Social Sciences. *Dissertation Research Methods: A Step-by-Step Guide to Writing Up Your Research in the Social Sciences*, 1-452. <https://doi.org/10.4324/9781003268154/DISSERTATION-RESEARCH-METHODS-ANTHONY-MILES-PHILIP-ADU/RIGHTS-AND-PERMISSIONS>
- Atwan, A. B. (2015). Islamic state: The Digital caliphate. In *Islamic State: The Digital Caliphate*. <https://doi.org/10.5860/choice.194638>
- Badran, M. (2001). Understanding Islam, Islamism, and Islamic Feminism. *Journal of Women's History*, 13(1). <https://doi.org/10.1353/jowh.2001.0022>
- Boler, M., & Davis, E. (2020). Affective Politics of Digital Media: Propaganda by Other Means. In *Affective Politics of Digital Media: Propaganda by Other Means*. <https://doi.org/10.4324/9781003052272>
- Campbell, H. A., & Evolvi, G. (2020). Contextualizing current digital religion research on emerging technologies. In *Human Behavior and Emerging Technologies* (Vol. 2, Number 1). <https://doi.org/10.1002/hbe2.149>
- Cirucci, A. M., & Pruchniewska, U. M. (2022). UX Research Methods for Media and Communication Studies: An Introduction to Contemporary Qualitative Methods. In *UX Research Methods for Media and Communication Studies*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003181750>
- Cristianti. (2024). *Cristianti, perempuan yang menyerukan rezim pemerintahan Islam di kolom komentar akun komunitas muslimah news*. Facebook. <https://www.facebook.com/share/17MBvvNRWs/>
- Eltantawy, N. (2012). Islam Dot Com: Contemporary Islamic Discourses in Cyberspace. *Arab Studies Quarterly*, 34(2).
- Erbayanthi, E. (2024). *Emirza Erbayanthi, telah mengkritik rezim pemerintahan sebagai bentuk respon postingan komunitas perempuan Muslimah News*. Facebook. <https://www.facebook.com/emirza.erbayanthi>
- Esposito, E., & KhosraviNik, M. (2023). Discourse in the digital age: A critical introduction. In *Discourse in the Digital Age: Social Media, Power, and Society*. <https://doi.org/10.4324/9781003300786-1>
- Fartty. (2024). *Fartty merupakan perempuan yang ikut memberikan komentar di kolom komentar akun komunitas muslimah news*. Facebook. <https://www.facebook.com/suparti.suparti.3323457>



Sulbi, S., Rohmaniyah, I. & Roswanto, A. (2026). Digital culture and the construction of Islamic political discourse: Islamist women's subjectivation on Facebook. *LITE: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya* 21 (2), 546-560. <https://doi.org/10.33633/lite.v21i2.16071>

Fikry, K. (2024). *Khalisah Fikry, adalah perempuan yang menyuarakan rezim Islam dan mengkritik sistem kapitalistik melalui kolom komentar akun Komunitas Perempuan Muslimah NEWS*. Facebook. <https://www.facebook.com/share/1ZgDNdDUwM/>

Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*. New York, 23, 270. <https://doi.org/citeulike-article-id:798470>

Foucault, M. (1995). *Discipline & Punish: The Birth of the Prison*. 352. https://books.google.com/books/about/Discipline_and_Punish.html?hl=id&id=AVzuf-r22eoC

Foucault, M. (2013). Archaeology of Knowledge. *Archaeology of Knowledge*, 1–239. <https://doi.org/10.4324/9780203604168/ARCHAEOLOGY-KNOWLEDGE-MICHEL-FOUCAULT/RIGHTS-AND-PERMISSIONS>

Fuchs, C. (2014). *Social media: A Critical introduction*. In Sage Publication, Inc.

Gee, J. P., & Handford, M. (2023). The Routledge Handbook of Discourse Analysis. In *The Routledge Handbook of Discourse Analysis*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003035244/ROUTLEDGE-HANDBOOK-DISOURSE-ANALYSIS-MICHAEL-HANDFORD-JAMES-PAUL-GEE>

Gheyntanchi, E., & Moghadam, V. N. (2014). Women, Social Protests, and the New Media Activism in the Middle East and North Africa. *International Review of Modern Sociology*, 40(1).

Gu, J. (2023). Social media and society: Integrating the digital with the social in digital discourse. In M. KhosraviNik (Ed.), *CADAAD Journal* (Vol. 15, Number 1). <https://doi.org/10.21827/cadaad.15.1.41598>

Hefner, R. W. (2020). Islamists, Muslim democrats and citizenship in contemporary Indonesia. In *Routledge Handbook of Political Islam*. <https://doi.org/10.4324/9780429425165-9>

Jensen, K. B. (2013). The qualitative research process. *A Handbook of Media and Communication Research: Qualitative and Quantitative Methodologies: 2nd Edition*, 265–282. <https://doi.org/10.4324/9780203357255-24/QUALITATIVE-RESEARCH-PROCESS-KLAUS-BRUHN-JENSEN>

Juwita, L. (2024). *Seperti inilah pernyataan Lista Juwita di akun kolom komentar Komunitas Muslimah News: Negara semakin miris dan tidak lagi peduli dengan rakyat, #negara-islam #butuh-kepemimpinan-pemerintahan Islam #Islam-sebagai Solusi*. Facebook. <https://www.facebook.com/lista.juwita>

Karim, U. (2025). *Umi Karim, sebagai perempuan yang mendukung gerakan Komunitas Muslimah News*. Facebook. <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556194873056>

Khan, A. (2018). The women's movement in Pakistan: Activism, Islam and democracy. In *The Women's Movement in Pakistan: Activism, Islam and Democracy*. <https://doi.org/10.1080/13552074.2019.1682312>

Kologlugil, S. (2010). Michel Foucault's archaeology of knowledge and economic discourse. *Erasmus Journal for Philosophy and Economics*, 3(2), 1–25. <https://doi.org/10.23941/EJPE.V3I2.53>

Lillahalkhalish, V. (2024). *Inilah pernyataan Vonny lillahalkhalish di kolom komentar akun facebook Komunitas Muslimah News, masalah bansos akibat negara yang masih menerapkan sistem kapitalisme. #Negara-islam-untuk-rakyat #butuh-kepemimpinan pemerintahan Islam #Islam-solusi-negeri*. Facebook. <https://www.facebook.com/vonny.lillahalkhalish>



- Sulbi, S., Rohmaniyah, I. & Roswanto, A. (2026). Digital culture and the construction of Islamic political discourse: Islamist women's subjectivation on Facebook. *LITE: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya* 21 (2), 546-560. <https://doi.org/10.33633/lite.v21i2.16071>
-
- Meikle, G. (2016). Social media: Communication, sharing and visibility. In *Social Media: Communication, Sharing and Visibility*. <https://doi.org/10.4324/9781315884172>
- Mills, S. (2003). *Michel Foucault*, 1–149. <https://doi.org/10.4324/9780203380437/MICHEL-FOUCAULT-SARA-MILLS-ROBERT-EAGLESTONE/RIGHTS-AND-PERMISSIONS>
- Minty, E. (2019). *Social media and the Islamic state*. Routledge India. <https://doi.org/10.4324/9780429198847>
- Mustofa, M. Y., & Taufiq, F. (2024). Islamic Feminism: Discourse on Gender and Sexuality in Contemporary Islam. *Gender, Place & Culture*, 31(3), 408–411. <https://doi.org/10.1080/0966369X.2023.2270268>
- Pihlaja, S. (2021). Analysing religious discourse. *Analysing Religious Discourse*, 1–360. <https://doi.org/10.1017/9781108863957>
- Rini Yusuf. (2024). *Pernyataan Rini Yusuf di akun kolom komentar Komunitas perempuan muslimah news sebagai bentuk respon postingan, seperti ini pernyataannya: jangan berharap negara akan berpihak pada rakyat, jika negara masih menerapkan sistem kapitalisme. Tegakkan negara Islam*. Facebook. <https://www.facebook.com/rini.setiawan.75>
- Silim, E. L. M. (2024). *Efi Luthfiah Muhamad Silim, juga ikut terlibat mengkritik rezim pemerintahan untuk merespon postingan Komunitas perempuan muslimah news*. Facebook. <https://www.facebook.com/efi.l.silim>
- Skoric, M. M., & Pang, N. (2024). Research handbook on social media and society. In *Research Handbook on Social Media and Society*. <https://doi.org/10.4337/9781800377059>
- Social Media and European Politics. (2017). In M. Barisione & A. Michailidou (Eds.), *Social Media and European Politics*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-59890-5>
- Stekelenburg, J. van, & Klandermans, B. (2023). A Social Psychology of Protest: Individuals in Action. *A Social Psychology of Protest*. <https://doi.org/10.1017/9781316823354>
- Taylor, D. (2010). Michel Foucault: Key Concepts. *Michel Foucault: Key Concepts*, 1–200. <https://doi.org/10.1017/UPO9781844654734>
- Uswatun. (2025). *Uswatun, perempuan yang menyerukan rezim Pemerintahan Islam di akun kolom komentar komunitas muslimah news*. Facebook. <https://www.facebook.com/share/1T8pSGPZtx/>
- Vlavo, F. A. (2017). Performing digital activism: New aesthetics and discourses of resistance. *Performing Digital Activism: New Aesthetics and Discourses of Resistance*, 1–162. <https://doi.org/10.4324/9781315692869/PERFORMING-DIGITAL-ACTIVISM-FID>
- Wilson, A., Morton, J., & Simeonova, B. (2023). Social media qualitative research vignettes. *Cambridge Handbook of Qualitative Digital Research*, 160–171. <https://doi.org/10.1017/9781009106436.014>
- Yoong, M. (2020). Professional discourses, gender and identity in women's media. *Professional Discourses, Gender and Identity in Women's Media*, 1–149. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-55544-3/SAVE-RESEARCH>

